

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mempunyai tugas-tugas penting untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat. Tugas dan tanggungjawab ini menjadi kewajiban pemerintah daerah menurut UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah menyelenggarakan asas otonomi, yang melingkupi anggaran yakni APBN yang ditetapkan undang-undang, lalu APBD ditetapkan oleh peraturan daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014).

Sesuai dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur tentang perimbangan keuangan antara kedua pihak maka tanggungjawab dan kekuasaan akan seluruhnya beralih pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri daerah dan sumber daya secara maksimal (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 2022). Karena tiap-tiap daerah memiliki potensi pengembangan dan pengelolaan sendiri, maka hal tersebut dilaksanakan agar tercipta pemerataan dan kesepadanan dalam keuangan antara pusat dan daerah (Oscar, 2022).

Daerah yang otonom, seharusnya mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang dapat dikatakan mandiri apabila berkurangnya ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah guna memperbaiki kesejahteraan rakyat adalah hal yang penting (Hasyim, 2021).

Bentuk penyelenggaraan otonom daerah salah satunya adalah pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai akuntabilitas publik (Robial et al., 2023). Usaha yang dapat dilakukan dalam melaksanakan transparansi serta akuntabilitas pada pemerintah yakni mewajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara secara tepat waktu dan dengan jangkauan yang luas bagi setiap pengelolaan negara (Oscar, 2022).

Pengelolaan sumber daya pada daerah otonom oleh pemerintah daerah membutuhkan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam mengelola instansi tersebut untuk mencapai hasil yang maksimal (Belinda & Costari, 2021).

Anggaran dikatakan sebagai sebuah rencana jangka pendek dalam sebuah organisasi yang pernyataannya menggunakan bentuk keuangan. Selain itu, anggaran juga merupakan suatu rencana keuangan yang melingkupi rancangan atau estimasi pengeluaran yang telah disepakati, serta sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Fungsi anggaran ini terutama pada pemerintah daerah adalah untuk mengatur dan menentukan besarnya pendapatan serta pengeluaran, lalu juga berfungsi sebagai sarana dalam menentukan keputusan yang diambil dan rencana-rencana pembangunan ke depan (Oscar, 2022).

Penganggaran merupakan nilai estimasi yang berupa perencanaan. Nilai yang telah dianggarkan kemudian dicantumkan dalam laporan keuangan. Akuntansi sektor publik mempunyai peran penting dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor publik itu sendiri. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sistem akuntansi yang dimana manfaatnya adalah untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan (Aminy et al., 2021). Sehingga selain manfaat tersebut, laporan keuangan ini juga berguna sebagai pemberi informasi mengenai keuangan serta sebagai alat akuntabilitas serta evaluasi kinerja terkhusus pada kinerja keuangan. Nilai anggaran yang ditelaah dianggarkan serta nilai realisasi tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran yang telah dikeluarkan ialah dapat menilai kinerja keuangan daerah. LRA menempati posisi terpenting karena LRA adalah jenis laporan keuangan yang lebih awal dihasilkan sebelum neraca, laporan operasional serta laporan arus kas. Selain itu, yang kita tahu bahwa anggaran ibarat tiang atau penonggak dalam penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah. Karena hal tersebut, laporan realisasi perlu ada dan sangat penting (Oscar, 2022).

Laporan keuangan pada pemerintahan atau sektor publik mempunyai perbedaan dengan laporan keuangan sektor privat jika dilihat dari bentuk pelaporan beserta elemen-elemen penyusun laporan keuangan serta standar akuntansi yang menjadi acuan dan petunjuk dalam menyusun laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan sektor publik meliputi neraca, LRA, LO, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas

dan catatan atas laporan keuangan (Subekti et al., 2024). Laporan inilah yang diolah dan dibentuk dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Peran utama laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai keuangan kepada para pihak yang berkepentingan. Karena itu, jika laporan keuangannya tidak ada maka mengakibatkan lemahnya akuntabilitas (Wijiyono, 2023).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mempunyai komponen keuangan yang berisikan informasi tentang realisasi pendapatan, transfer, belanja, surplus/defisit, serta lain-lain (Fu'ad & Sambharakreshna, 2024). Akun-akun belanja hanya ada di dalam LRA, belanja daerah merupakan pengeluaran-pengeluaran dari rekening daerah yaitu kas umum yang kemudian menyusutkan saldo anggaran lebih pada tempo waktu sesuai dengan tahun anggarannya (Oscar, 2022). Dilihat dari fungsi anggaran pemerintah daerah tersebut maka anggaran ini dinilai cukup penting untuk keberlangsungan perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Ketika suatu anggaran telah direalisasikan dan nilai antara penganggaran dan realisasinya sesuai, maka disitulah kinerja pemerintah dinilai. Dapat kita lihat berdasarkan seberapa besar kesesuaian antara nilai yang dianggarkan dengan pewujudannya (Nurhayati, 2023).

Anggaran dan realisasinya juga dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keefektifan dalam pengambilan keputusan dalam penganggaran dan pembiayaan selama periode anggaran sehingga menurut pembaca laporan keuangan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang telah dipublikasikan tersebut (Oscar, 2022).

Hasil dari analisis yang dilakukan oleh pembaca laporan keuangan dapat berupa hasil kinerja pada perusahaan atau instansi. Kinerja ialah penggambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi (Juru, 2020). Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses penilaian kesesuaian antara program atau kegiatan yang sudah ditetapkan sesuai dengan rencana dan untuk menilai apakah telah tercapai tujuan yang telah ditetapkan pada saat perencanaan (Riwukore et al., 2022).

Kinerja dan pengukurannya ini dapat diterapkan untuk dapat mengevaluasi perwujudan dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Kinerja juga dapat melihat apakah dalam suatu instansi terutama pemerintahan telah mencapai kriteria yang telah diputuskan atau ditetapkan (W. H. Prasetyo & Nugraheni, 2020). Kriteria dapat berupa tujuan, target, yang ingin dicapai. Dari hal tersebut didapatkan bahwa kinerja merupakan hal yang penting dan kinerja dapat diukur menggunakan pengukuran kinerja (Silviana et al., 2019).

Kinerja keuangan salah satu alat pengukurnya ialah analisis belanja. Belanja daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah seluruh pengeluaran yang mengurangi kekayaan atau modal dana lancar dari rekening KUD dalam periode yang telah ditentukan kemudian tidak akan memperoleh pembayaran kembali dari pemerintah daerah (Oscar, 2022). Dari belanja daerah tersebut, dapat kita lihat pengeluarannya. Sebelum terjadinya pengeluaran, maka dana yang belum dikeluarkan tersebut dianggarkan terlebih dahulu. Kemudian akan menjadi pengeluaran bagi daerah yang disebut dengan belanja.

Belanja dalam laporan keuangan adalah bagian penting sehingga menjadi sorotan karena masyarakat sebagai pemberi dana melalui pajak daerah (Fitri & Khotimah, 2022). Masyarakat berkepentingan untuk mengetahui apakah dana yang telah mereka keluarkan telah dikelola dengan baik dan semestinya serta bertujuan untuk kepentingan publik. Belanja juga mencerminkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan (Pratama & Mandai, 2023). Analisis belanja penting untuk dilakukan karena dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah yang telah menggunakan APBD, analisis belanja tersebut dapat melihat secara ekonomis, efektif dan efisien pemakaian APBD oleh pemerintah (Devi et al., 2024). Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja menjadi motivasi untuk melakukan efisiensi/ penghematan atas anggaran. Pemerintah tidak harus lagi berpegang untuk menghabiskan anggaran melainkan berorientasi pada *output* serta *outcome* nya (Oscar, 2022). Adapun analisis belanja terdiri atas analisis varians, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan analisis rasio efisiensi belanja (P & Palimbong, 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Sartika dengan judul analisis Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan realisasi anggaran belanja pada instansi Bappeda Provinsi Sumatera utara tahun 2014-2016 terus mengalami perubahan.pertumbuhan belanja pada pada tahun anggaran 2015/2016 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja yang cukup efisien. Hasil pengukuran tingkat efisiensi anggaran belanja pada tahun 2014-2016 dengan

menggunakan analisis varians belanja menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran selama tahun anggaran, karena tidak melebihi target anggaran pada periode tersebut. Hasil analisis keserasian belanja BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara lebih memprioritaskan anggaran pada belanja operasinya daripada belanja modal, hal ini menunjukkan Bappeda provinsi Sumatera Utara lebih mengoptimalkan pelaksanaan jalannya pemerintahan, sedangkan untuk pembangunan daerahnya masih sangat kecil. Meninjau hasil penelitian tersebut bahwa pentingnya melakukan analisis kinerja belanja maka perlu juga dilakukan pada entitas Pemerintah Daerah lain (Sartika, 2018).

Pada pemerintahan daerah, terdapat struktur pemerintahan daerahnya. Perangkat daerah yaitu Rumah Sakit S.K. Lerik yang menjadi salah satu Lembaga Layanan Kesehatan yang dinaungi Pemerintah Daerah Kota Kupang. Dalam penyelenggaraan administrasi keuangan pada Rumah Sakit SK Lerik terdapat laporan keuangan, salah satu laporan penting ialah Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran berisi tentang anggaran yang telah dibentuk dan dianggarkan yang kemudian anggaran tersebut akan direalisasikan yang salah satunya adalah belanja daerah (Oscar, 2022). Anggaran belanja ini ketika telah disetujui maka dapat menunjang pembelanjaan daerah yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu dengan adanya anggaran yang bersifat sebagai tiang akan menjadikan suatu organisasi lebih terarah dalam melakukan kegiatan ataupun program (Enre, 2020). Berikut ini adalah data belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Rumah Sakit SK Lerik Tahun 2020 – 2023

Tabel 1.1
Data Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rumah Sakit
SK Lerik Tahun 2020 – 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	Prosentase
T A H U N 2 0 2 0					
BELANJA OPERASI					
1	Belanja Pegawai	29,613,436,864.00	29,705,875,847.00	-92,438,983.00	100.31%
2	Belanja Barang	15,219,193,100.00	14,459,115,822.00	760,077,278.00	95.01%
3	Jumlah Belanja Operasi	44,832,629,964.00	44,164,991,669.00	667,638,295.00	98.51%
BELANJA MODAL					
1	Belanja Peralatan dan Mesin	4,275,466,457.00	32,558,396,085.00	- 28,282,929,628.00	761.52%
2	Belanja Gedung dan Bangunan	1,258,430,615.00	988,158,640.00	270,271,975.00	78.52%
3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7,500,000.00	159,796,800.00	-152,296,800.00	2130.62%
4	Jumlah Belanja Modal	5,541,397,072.00	33,706,351,525.00	- 28,164,954,453.00	608.26%
5	Jumlah Belanja	50,374,027,036.00	77,871,343,194.00	- 27,497,316,158.00	154.59%
6	Jumlah Belanja dan Transfer	50,374,027,036.00	77,871,343,194.00	- 27,497,316,158.00	154.59%
7	SURPLUS / DEFISIT	(30,374,027,036.00)	(24,367,106,375.00)	6,006,920,661.00	80.22%
T A H U N 2 0 2 1					
BELANJA OPERASI					
1	Belanja Pegawai	31,623,262,601.00	32,234,632,569.00	-611,369,968.00	101.93%
2	Belanja Barang	22,909,839,434.00	22,288,740,753.00	621,098,681.00	97.29%
3	Jumlah Belanja Operasi	54,533,102,035.00	54,523,373,322.00	9,728,713.00	99.98%
BELANJA MODAL					
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,000,625,852.00	8,804,498,188.00	1,196,127,664.00	88.04%
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32,542,744,800.00	32,431,016,377.47	111,728,423.00	99.56%
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	
4	Belanja Modal Aset lainnya	75,000,000.00	37,623,500.00	37,376,500.00	50.16%
5	Jumlah Belanja Modal	42,618,370,652.00	41,273,138,065.47	1,345,232,586.53	96.84%
6	Jumlah Belanja	97,151,472,687.00	95,796,511,387.37	1,354,961,299.63	98.61%
7	SURPLUS / DEFISIT	(67,051,472,687.00)	(63,643,152,489.47)	3,408,320,197.53	94.92%
T A H U N 2 0 2 2					
BELANJA OPERASI					
1	Belanja Pegawai	35,588,021,285.00	39,013,873,033.00	-3,425,851,748.00	109.63%
2	Belanja Barang	24,785,067,594.00	23,759,302,612.00	1,025,764,982.00	95.86%
3	Jumlah Belanja Operasi	60,373,088,879.00	60,773,175,645.00	-400,086,766.00	103.98%
BELANJA MODAL					
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,246,911,721.00	6,671,727,841.00	575,183,880.00	92.06%
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500,000,000.00	493,979,280.00	6,020,720.00	98.80%
3	Belanja Modal Aset	-	-	-	0.00%

	Lainnya				
4	Jumlah Belanja Modal	7,746,911,721.00	7,165,707,121.00	581,204,600.00	92.50%
5	Jumlah Belanja	68,120,000,600.00	69,938,882,766.00	-1,818,882,166.00	102.67%
6	SURPLUS / DEFISIT	(27,120,000,600.00)	(14,959,877,335.00)	12,160,123,265.00	55.16%
TAHUN 2023					
BELANJA OPERASI					
1	Belanja Pegawai	39,332,484,052.00	37,559,130,931.00	1,773,353,121.00	95.49%
2	Belanja Barang	25,845,563,272.00	22,755,651,162.00	3,089,912,110.00	88.04%
3	Jumlah Belanja Operasi	65,178,047,324.00	60,314,782,093.00	4,863,265,231.00	92.54%
BELANJA MODAL					
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,389,766,500.00	709,634,169.00	3,680,132,331.00	16.17%
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	0.00%
3	Jumlah Belanja Modal	4,389,766,500.00	709,634,169.00	3,680,132,331.00	16.17%
4	Jumlah Belanja	69,567,813,824.00	61,024,416,262.00	8,543,397,562.00	87.72%
5	SURPLUS / DEFISIT	(33,567,813,824.00)	(26,182,098,212.49)	7,385,715,611.51	78.00%

Sumber: LRA RSUD Samuel Kristian Lerik Kupang Tahun Anggaran 2020-2023

Tabel 1.2
Tabel Capaian Persentase Kinerja Belanja RSUD SK. Lerik
Tahun 2020–2023

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Kategori Kinerja
2020	50.374.027.036	77.871.343.194	154.59%	Tidak Efisien
2021	97.151.472.687	95.796.511.387	98.61%	Efisien
2022	68.120.000.600	69.938.882.766	102.67%	Tidak Efisien
2023	69.567.813.824	61.024.416.262	87.72%	Efisien

Berdasarkan tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja RSUD Samuel Kristian Lerik dan tabel 1.2 Capaian Presentase Kinerja Belanja pada RSUD Samuel Kristian Lerik tahun 2020 – 2023.

Pada tahun 2020 pemerintah secara keseluruhan memperlihatkan bahwa target anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 50.374.027.036,00 dan realisasinya sebesar Rp 77.871.343.194,00 dengan persentase berada pada 154,59%. Hal ini mengindikasikan pemborosan atau perencanaan anggaran yang lemah, sehingga dikategorikan **tidak efisien**. Tahun 2021 target anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 97.151.472.687,00 dan realisasinya sebesar

Rp 95.796.511.387,47 dengan prosentase berada pada 98,61%. Capaian realisasi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran hampir tepat dan dikategorikan **efisien**. Tahun 2022 kembali menunjukkan kelebihan realisasi sebesar 102,67%, yang berarti RSUD mengeluarkan anggaran lebih dari yang direncanakan. Meskipun selisih tidak terlalu besar, ini tetap masuk dalam kategori tidak efisien. Tahun 2023, capaian hanya sebesar 87,72%, yang berarti anggaran tidak terpakai seluruhnya. Namun demikian, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk **efisiensi tinggi** jika tidak mengganggu pencapaian output pelayanan. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa baik anggaran belanja maupun realisasi anggaran belanja RSUD SK Lerik setiap tahunnya cenderung fluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan.

Dapat dilihat bahwa realisasi belanja tahun anggaran 2020 sampai 2023 terdapat beberapa item belanja yang realisasinya diatas anggaran. antara lain; Belanja pegawai, belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja pegawai, dan belanja pegawai. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah agar anggaran belanja dapat digunakan sesuai peruntukannya dan anggaran tidak mengalami defisit.

Berdasarkan latar belakang masalah maka perlu dilakukan penilaian kinerja belanja guna mengetahui selisih. Karena itu peneliti bermaksud tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Belanja pada RSUD Samuel Kristian Lerik Tahun 2020 - 2023**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: "Bagaimana kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran pada RSUD Samuel Kristian Lerik tahun 2020 – 2023?"

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja belanja dalam Laporan Realiasi Anggaran pada RSUD Samuel Kristian Lerik tahun 2020-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi RSUD Samuel Kristian Lerik

Manfaat penelitian bagi RSUD Samuel Kristian Lerik ialah diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja untuk kedepannya.

2. Bagi Akademik

Untuk menambah literatur dan referensi karya tulis ilmiah bagi mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

3. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman penelitian terdahulu serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama tetapi dengan objek penelitian yang berbeda.